

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adjie, Habib, 2009, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta.
- Agustina, Rosa, 2012, *Hukum Perikatan (Law Of Obligations)*, Pustaka Larasan, Bali.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta
- Arba, H.M , 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly dan Safaat, M. Ali, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta
- Azwar, Saifuddin, 2013, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Erwiningsih, Winahyu dan Sailan, Fakhriyza Zaili, 2019, *Hukum Agraria: Dasar – Dasar dan Penerapannya di Bidang Pertanahan*, UII Press, Yogyakarta.
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- FH UII, Pusdiklat, 2017, *Modul Praktikum Penyusunan Kontrak*, Laboratorium Pusdiklat FH UII, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2017 *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 5. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- H.S Salim, 2019, *Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Rajagrafindo Persada, Depok.

H.R, Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harsono, Budi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

Insaeni, Insaeni 2016, *Perjanjian Jual Beli*, PT Refika Aditama, Bandung.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung

Marzzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kharisman Putra Utama, Jakarta.

M.Marwan, Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2013, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT.Alumni, Bandung.

Mulyoto, 2012, *Perjanjian; Teknik, Cara membuat, dan Hukum Perjanjian yang harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta.

Mustofa, 2014, *Tuntutan Pembuatan Akta – Akta PPAT*, Ctk.Ketiga, Penerbit karya Media, Yogyakarta.

Nasution, Bahder Johan, 2016, *Metode Penemuan Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Santoso, Urip, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah; Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Penerbit Kencana, Jakarta

Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung

Soekanto, Soerjono, 2006, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Soemitro, Ronitijo Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta

Sutedi, Adrian, 2006, *Kekuatan Berlakunya Sertipikat sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Jakarta: BP Cipta Jaya

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP): *Staatsblad* 23/1847

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.

Peraturan Pemenrintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Intruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 217/Pdt/2019/PT.SMG.

### C. Tesis

Hasibuan Amanda Amri, 2017, “Akibat Hukum Suatu Peralihan Hak Atas Tanah Yang Didasarkan Pada Unsur Penyalahgunaan Keadaan Dan Pembayaran Fiktif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pdt/2017)”, *Tesis* Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Maria Kezia, 2018, “Tanggung Jawab dan Akibat Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Pembuatan Akta Jual Beli berdasarkan Kuasa Mutlak”, *Tesis* Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Siregar Nelly Sriwahyuni, 2008, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Kuasa Mutlak dalam Peralihan Hak Atas Tanah oleh Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)”, *Tesis* Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

### D. Jurnal

Dewi Luh Wike Septia, “Implementasi Pasal 39 Ayat (1) Huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terkait Jual Beli dengan Kuasa Mutlak Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Klungkung”, *Acta Comitas* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 1, Nomor 1, April 2016, hlm.95

Hatta Isnaini Wahyu dan Wanda Hutomo, Hendry Dwicahyo, “Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat”, *Ius Quia Iustum*, Volume 24, Nomor 3, Juli 2017, hlm.473.

Pelenkahu Diana Risqy, Liza Priandhini, Siti Hajati Hoesin, 2017, “Pembuatan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT yang menjadi Alas Hak Tanggungan sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 124/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel)”, *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.8

Prawira I Gusti Bagus Yoga, “Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah”,  
*Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 4, Nomor 1, April 2016, hlm.65

Purnayasa Agus Toni, “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik”, *Acta Comitatus*, Volume 3, Nomor 3, Desember 2018, hlm.400

Putri Ghina Rezki, Ismala Dewi, Arsin Lukman, “Akta Jual Beli Berdasarkan Akta Kuasa Mutlak Sebagai Pengikat Perjanjian Hutang Piutang”, *Indonesian Notary*, Volume 3, Nomor 3, 2021, hlm.155

Sandhy Aditya dan Witasari Aryani Nugraha. “Tanggungjawab dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Di Kota Semarang”, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Volume 2, Nomor 18, Oktober 2019, hlm.20

Vania Clara dan Gunawan Djajaputra, “Keabsahan Penggunaan Kuasa Mutlak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah Yang Dibuat Oleh Notaris”, *Hukum Adigama*, Volume 1, Nomor 2, 2018, hlm.5

#### **E. Wawancara**

Suparmin, 2022, Tanggung Jawab terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah karena Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta melihat pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 217/Pdt/2019/Pt.Smg, *Wawancara, Melalui Zoom Meeting*, 11 Januari 2022.

Suparmin, 2022, Akibat hukum dari Perbuatan Melawan Hukum oleh PPAT dalam proses pembuatan Akta melihat pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 217/Pdt/2019/Pt.Smg, *Wawancara, Melalui Zoom Meeting*, 11 Januari 2022.